

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA

Oleh:
AMI*
NIM. E21108007

Dr.Sri Haryaningsih, M.Si², Ira Patriani,S.I.P, M.Si²

1. Mahasiswa Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
2. Dosen Pembimbing Mahasiswa Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

*Email: ami@untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 31 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Sungai Raya, dianalisis menggunakan teori Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Pengorganisasian; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya selaku pelaksana kebijakan mengalami kekurangan sumber daya peralatan 2) Interpretasi; implementor sudah mensosialisaikan Peraturan Bupati No.31 tahun 2014 namun masih kurangnya dukungan masyarakat. 3) Aplikasi; belum dilaksanakan sanksi . Saran: pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya menambah armada pengangkut, meningkatkan sosialisasi dan melaksanakan sanksi. Sehingga tujuan dari Peraturan Bupati no.31 tahun 2014 dapat tercapai.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan , Peraturan Bupati No.31 tahun 2014

IMPLEMENTATION OF REGENT'S REGULATION NO.31 OF 2014 ON HANDLING AND MANAGING WASTE IN SUNGAI RAYA SUB-DISTRICT

Abstract

The research aimed at finding and describing how the local government has applied regent's Regulation No. 31 about waste management in Sungai Raya sub-district using a theory of Charles O Jones, that is organization, interpretation and application. The research finding showed that in term of Organization, Public Works and City Management Office which implements the policy has limited human resources to apply the regulation. second, in term of interpretation, the policy implementator has socialized the program but fewer supports from societies. Finally, in application of the theory, sanction is not applied yet. It is suggested that Public Work and City Management Office should have more vehicles to transport the waste, socialize the policy to wider communities and give fine or sanction to those who break the regulation. By doing these efforts, it is hoped that the goal of the regent's regulation could be achieved.

Key words: Implementation Public of Policy, the Regent's Regulation No.31 of 2014

A. PENDAHULUAN

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya permasalahan sampah masih menjadi masalah serius, pengelolaan sampah pada saat ini adalah model pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan, dampaknya adalah pada tempat pembuangan sementara (pengumpulan) kita bisa lihat hampir di semua dari 29 Tempat Pembuangan Sementara yang ada di Kecamatan Sui Raya

sering terjadi penumpukan sampah bahkan meluber sampai kejalan, karena terlambat di angkut ke tempat pembuangan akhir, dan juga karena adanya Tempat Pembuangan Sementara (bak semen) yang rusak sehingga banyak sampah berserakan di sekitarnya. Bahkan kita juga bisa melihat ada tumpukan sampah di tempat tempat yang bukan tempat sampah seperti di pinggir jalan atau di tanah kosong.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebenarnya sudah membuat suatu Kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Pengelolaan sampah, namun hasilnya sampai saat ini masih belum memuaskan. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 armada yang dimiliki oleh Pemkab Kubu Raya masih kurang, sehingga berakibat pada pelaksanaan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir terganggu dan tidak sesuai jadwal, penerapan sanksi pada masyarakat yang membuang sampah diluar jam membuang sampah juga belum dilaksanakan. Di tambah lagi kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal masih sangat rendah.

B. KAJIAN TEORI

Istilah kebijakan secara umum sering digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (pejabat yang ada didalam suatu lembaga pemerintahan) dalam melaksanakan tindakan maupun kegiatan pemerintah pada umumnya..

Menurut Frederickson dalam Pasolong (2007:6-7) menjelaskan konsep “publik” dalam lima perspektif, yaitu :

1. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat,
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri,
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara,
4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi dan
5. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena

partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai suatu hal yang paling penting.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara 2014:257) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan undang-undang (*ability of the statue of structure implementation*), lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

Dalam implementasi, pelaksana harus tunduk kepada instruksi-instruksi legal dan petunjuk-petunjuk tertentu yang dibuat oleh pembuat kebijaksanaan, maka sebelum melaksanakan proses implementasi, pelaksana harus mengetahui atau memahami apa yang harus mereka lakukan.

Selanjutnya menurut Jones dalam Widodo (2010:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan terdapat tiga macam

variabel, yaitu Interpretasi (*Interpretation*), Organisasi (*Organization*), dan Aplikasi (*Application*).

a. Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan managerial dan kebijakan managerial dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2010:90).

Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan. Pada aspek interpretasi, meliputi beberapa hal-hal yang berupa:

1. Isi dan Tujuan Dipahami
2. Sosialisasi
3. Dukungan Masyarakat

b. Organisasi (*Organization*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa yang pelakunya, penetapan anggaran,

penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2012:91).

Menurut Jones (dalam Widodo, 2012:91) ada beberapa bagian dalam organisasi ini, yaitu:

1. Pelaksana Kebijakan
2. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

c. Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89).

Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan. Pada aspek *application* (aplikasi), meliputi hal-hal berupa:

1. Pedoman Program
2. Pelaksanaan bersifat dinamis

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengembangan konsep dan pengumpulan fakta, kemudian menceritakan dan menggambarkan suatu obyek secara rinci dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi data tersebut diolah lebih lanjut dengan tidak melakukan pengujian hipotesis. Seperti yang dikatakan Moleong (2004:6) bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Pengelolaan sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Menceritakan fenomena dan situasi yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian

D. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan objek penelitian Peraturan Bupati No 31 tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Sungai Raya dengan luas wilayah 673.522 km² dan jumlah penduduk 233.525 jiwa tersebar di 20 Desa yang ada di kecamatan Sungai Raya. Desa Sungai Raya, Desa Parit Baru, Desa Teluk Kapuas dan Desa Arang Limbung adalah Desa yang berpenduduk yang lebih padat di bandingkan Desa lainnya yang ada di Kecamatan Sungai Raya, dan inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Raya

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori Charles O. Jones sebagai tolak ukur berjalannya Implementasi Peraturan Bupati No.31 tahun 2014 . Aktivitas implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones terdapat tiga macam yaitu, pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari Peraturan Bupati No.31 tahun 2014 tersebut,

berbagai cara atau berbagai aktivitas implementasi kebijakan dilakukan dan melibatkan berbagai instansi pemerintahan terkait yang turut andil agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Dari aspek Organisasi. Peneliti Ingin melihat apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana kebijakan sudah melaksanakan sesuai SOP serta bagaimana Sumber Daya yang dimilikinya. Peneliti bertanya langsung pada Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum. (Rendra Juarsyah, S.Hut) menurutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah bekerja sesuai SOP dan Sumber Daya yang dimiliki sudah mencukupi melaksanakan kebijakan ini. Aspek lainnya adalah Interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan. Pada aspek interpretasi, meliputi beberapa hal-hal yang berupa:

1. Isi dan Tujuan Dipahami
2. Sosialisasi
3. Dukungan Masyarakat

untuk mengetahui sejauhmana pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memahami kebijakan, peneliti mewawancarai Kepala

Bidang Kebersihan, Petamanan dan Penerangan jalan Umum Bapak Rendra Juarsyah, S.hut menuturkan sebagai berikut:

“pada intinya tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan lingkungan hijau, sehat dan terhindar dari sampah, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas diketahui bahwa implementor sudah mengetahui dengan baik tujuan dari Peraturan Bupati No. 31 tahun 2014. Sosialisasi sudah dilakukan dengan berbagai cara namun kurangnya dukungan masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai belum maksimal.

Selanjutnya Aspek Aplikasi Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan. Pada aspek *application* (aplikasi), meliputi hal-hal berupa:

Berdasarkan wawancara dengan Kasi kebersihan bapak Sudarsono S.Sos tentang bagaimana kegiatan pengangkutan sampah rutin dari Tempat Pembuangan Sampah

Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), dan bagaimana pelaksanaannya di hari libur apakah ada kendala ;

“pelayanan rutin mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir tidak ada masalah sudah sesuai jadwal, kami tak mengenal hari libur kami biasanya mulai bekerja dari jam 18.00 sampaidengan 06.00 pagi”

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Pengorganisasian. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya selaku pelaksana sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP , namun jika dilihat dari sumberdaya, armada pengangkut sampah masih kurang, ini bisa dilihat sering terlambatnya pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terganggu. Akibatnya terjadi penumpukan sampah di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dan mengotori daerah sekitar.

2. Aspek Interpretasi. Tujuan Peraturan Bupati dan Sasaran Peraturan Bupati No. 31 tahun 2014 sudah diketahui oleh implementor dengan jelas namun dalam pelaksanaannya masih kurangnya sosialisasi serta kurangnya dukungan masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Peraturan Bupati No. 31 tahun 2014 belum maksimal.
3. Pada Aspek Aplikasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaannya sudah sesuai pedoman kerja dan bersifat dinamis, namun sanksi belum diterapkan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan.

F. SARAN

1. Pada Aspek Pengorganisasian

Untuk Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, agar pelaksanaan Peraturan Bupati No.31 tahun 2014 berjalan optimal perlu adanya penambahan armada serta perbaikan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang terbuat dari Semen agar ketika ada angin sampah tidak berterbangan dan mengotori daerah

sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

2. Pada bagian Interpretasi:

Dalam Implementasi Peraturan Bupati No.31 tahun 2014, sosialisasi harus terus dilakukan agar program ini dapat terlaksana dengan baik serta masyarakat ikut berpartisipasi aktif, karena tanpa dukungan masyarakat maka tujuan dari kebijakan yang dibuat akan sulit di capai.

3. Pada bagian Aplikasi

Pada pelaksanaan rutin Peraturan Bupati No.31 tahun 2014, pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP , namun diperlukan sanksi pada masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati no 31 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

G. REFERENSI

Anggara, Sahya. 2014. **Kebijakan Publik**. Bandung : Pustaka Setia.

Meleong, Lexy. 2004. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2012. **Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang**. Jakarta : Elex Media Komputindo.

O.Jones, Charles. 1996. **Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pasolong, Harbani. 2010. **Teori Administrasi Publik**. Bandung Alfabeta,

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta

Silalahi, Ulber. 2010. **Metodologi Penelitian Sosial**. Bandung: Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2010. **Metodologi Penelitian**

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. **Metode Penelitian Survey**. Jakarta.LP3ES.

Sugiyono. 2009. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta.

-----, 2012. **Metode Penelitian Administrasi**. Bandung : Alfabeta.

Usman, Husaini. 2011. **Metodologi Penelitian Sosial**. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2010. **Analisis Kebijakan Publik**. Malang : Bayumedia Publishing

Wiludjeng, Sri. 2007. **Pengantar Manajemen**. Yogyakarta : Graha Ilmu

Wiludjeng, Sri. 2007. **Pengantar Manajemen**. Yogyakarta : Graha Ilmu

Winarno, Budi. 2002. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Media Pressindo

Dokumen:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati No 31 tentang Penanganan
dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
di Kubu Raya.

Skripsi:

Yuliana. 2015. ***Pengelolaan Sampah Dalam
Mewujudkan Kebersihan Kota di
Kabupaten Kubu Raya.*** Skripsi. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura.

Aminah. Siti. 2016. ***(Implementasi
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Rumah Baca Barat(Suatu Studi
di Kelurahan Sungai Jawi Dalam
Kecamatan Pontianak Barat)*** Skripsi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ami
NIM / Periode lulus : E21108007
Tanggal Lulus : 12 Juli 2017
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Program Studi : Administrasi Negara
E-mail address/ HP : ami.untan.ac.id / 0856206066

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah
saya yang berjudul**):

Implementasi Peraturan Bupati NO. 31 Tahun 2014 tentang
Penanganan dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah
di Kecamatan Sungai Pagar

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltext*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/dietujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Rendi M. A.B.
NIM 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 12 Juli 2017

Ami
NIM E21108007

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodem/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)